KATALOG : 4102002.3471

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA YOGYAKARTA 2021

https://yogjakota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK
KOTA YOGYAKARTA

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA

KOTA YOGYAKARTA 2021

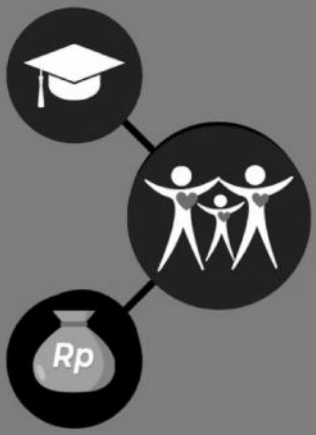

https://jogjakota.bps.go.id

INDEKS PEMBANGUNAN MANUSIA
KOTA YOGYAKARTA
2021

ISBN :
No. Publkasi : 34710.2218
Katalog BPS : 4102002.3471
Ukuran Buku : 14,8 cm x 21 cm
Jumlah Halaman : xii + 50

Naskah :
Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Penyunting :
Syarif Zully Purwoko

Gambar/Kulit :
Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Diterbitkan oleh :
@Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Dilarang mengumumkan, mendistribusikan, mengomunikasikan dan/atau menggandakan sebagian atau seluruh isi buku ini untuk tujuan komersil tanpa izin tertulis dari Badan Pusat Statistik

.

https://jogjakota.bps.go.id

KATA PENGANTAR

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) biasa digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dalam publikasi ini IPM diaplikasikan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota, khususnya Kota Yogyakarta sampai tahun 2021.

Pembangunan manusia dirumuskan sebagai pengembangan pilihan bagi penduduk yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah 'perluasan pilihan'. Pengembangan manusia dapat dilihat sebagai pembangunan kemampuan melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan, sekaligus pemanfaatan kemampuan/ketrampilan mereka tersebut.

Data pokok yang terdapat pada publikasi ini bersumber dari data dasar yang ada di BPS Kota Yogyakarta dan data sekunder dari instansi terkait, dengan berbagai pengolahan yang diperlukan. Penghitungan pada IPM tahun 2021 ini telah menggunakan metode baru yang merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya. Kepada semua pihak yang telah membantu terbitnya publikasi ini disampaikan terima kasih.

Publikasi ini dimaksudkan untuk dapat ikut membantu melengkapi ketersediaan data/informasi bagi para perencana dan penyusun kebijakan serta konsumen data yang lain.

https://jogjakota.bps.go.id

Saran dan kritik yang membangun dari para pengguna data demi kesempurnaan publikasi selanjutnya di masa yang akan datang sangat diharapkan.

Yogyakarta, Agustus 2022

Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta

Kepala,

Mainil Asni, SE, ME

https://jogjakota.bps.go.id

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR iii
DAFTAR ISI v
DAFTAR TABEL viii
DAFTAR GAMBAR ix
ABSTRAKSI x
BAB I. PENDAHULUAN 1
1.1. Latar Belakang 1
1.2. Mengenal Indeks Pembangunan Manusia 3
1.3. Maksud dan Tujuan 4
1.4. Sistematika Penulisan 4
BAB II. METODOLOGI 5
2.1. Pembangunan Manusia 5
2.2. Indikator Pembangunan Manusia 5
2.3. Metode Perhitungan IPM 13
2.4. Pertumbuhan IPM 15
2.5. Sumber Data 15
BAB III. GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA 16
3.1. Karakteristik Geografis, Administratif, dan Fisiografis 16

https://jogjakota.bps.go.id

3.2. Karakteristik Penduduk 17
3.3. Pendidikan 19
3.4. Kesehatan 21
3.5. Perekonomian 23
BAB IV. IPM KOTA YOGYAKARTA 26
4.1. Perkembangan IPM Kota Yogyakarta 26
4.2. Perbandingan IPM antar Wilayah 32
4.3. Perkembangan Indikator Komponen IPM 33
BAB V. KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN 41
DAFTAR PUSTAKA 48

https://jogjakota.bps.go.id

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	Konversi Ijazah……	9
Tabel 2.2	Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir……..	10
Tabel 2.3	Nilai minimum, maksimum, dan range pencapaian indikator komponen IPM……..	14
Tabel 3.1	Pembagian Wilayah dan Luas Wilayah Kota Yogyakarta, 2021……..	17
Tabel 3.2	Perkembangan Penduduk Kota Yogyakarta, 1961-2020……..	18
Tabel 3.3	Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan dan Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021……	19
Tabel 3.4	Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Wajar 9 Tahun dan Angka Melek Huruf Dewasa di Kota Yogyakarta, 2017-2021……..	20
Tabel 3.5	Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru di Kota Yogyakarta, 2019/2020-2020/2021……..	21
Tabel 3.6	Persentase Rumah Tangga Berlantai Tanah dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Kota Yogyakarta, 2017-2021 ……..	22
Tabel 3.7	Distribusi Persentase PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2017-2021……..	23
Tabel 4.1	IPM Kota Yogyakarta Menurut Komponen, 2017-2021……..	26
Tebel 4.2	Perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2021……..	33
Tabel 4.3a	Perbandingan Indikator Penyusun IPM Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2021……..	34
Tabel 4.3b	Perbandingan Indikator Penyusun IPM Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2021 (Lanjutan)……..	35
Tabel 4.4	Pertumbuhan PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010, 2017-2021 ……..	37

https://jogja.bps.go.id

Tabel 4.5 Jumlah Hotel/Jasa Akomodasi Menurut Kecamatan di Kota Yogyakarta, 2021..... 38
Tabel 4.6 Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta 2018-2021 (milyar rupah)..... 39

https://jogjakota.bps.go.id

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kota Yogyakarta, 2017-2021..... 24
Gambar 3.2 PDRB per Kapita Kota Yogyakarta, 2011-2015 (Juta Rupiah)... 25
Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup..... 27
Gambar 4.2 Harapan Lama Sekolah..... 29
Gambar 4.3 Rata-Rata Lama Sekolah..... 30
Gambar 4.4 Rata-rata Pengeluaran..... 31
Gambar 4.5 Indeks Pembangunan Manusia..... 32
Gambar 4.6 Skema Analisis Penentu IPM 36

https://jogjakota.bps.go.id

ABSTRAKSI

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) digunakan untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dalam publikasi ini indeks tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota, khususnya Kota Yogyakarta sampai tahun 2021.

Secara umum, pembangunan manusia di Kota Yogyakarta pada 2021 mengalami kemajuan setelah dampak pandemi Covid-19 pada 2020 berpengaruh pada hasil perhitungan IPM di Kota Yogyakarta. Pada 2021 nilai IPM Kota Yogyakarta mencapai 87,18. Derajat kesehatan Kota Yogyakarta relatif baik, hal ini ditunjukkan dengan angka harapan hidup waktu lahir yang relatif panjang yaitu mencapai 74,76 tahun pada 2021.

Pada 2021 tingkat pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta secara umum sudah relatif maju. Hal ini ditunjukkan angka Harapan Lama Sekolah sebesar 17,60 dan rata-rata lama sekolah yang sudah relatif panjang, yaitu 11,72 tahun atau rata-rata sudah menempuh kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Angka pengeluaran riil relatif dominan berpengaruh terhadap kenaikan IPM Kota Yogyakarta. Pengeluaran riil per kapita Kota Yogyakarta mengalami peningkatan pada tahun 2021. Pada 2020 pengeluaran riil per kapita sekitar Rp. 18.678 ribu meningkat menjadi Rp. 18.801 ribu pada 2021.

Memacu pembangunan manusia melalui pembelanjaan publik merupakan suatu hal yang masuk akal karena perbaikan kesehatan dan pendidikan yang dihasilkan akan menjadi ‘barang publik’, artinya manfaat

https://jogjakota.bps.go.id

yang diperoleh tidak hanya dinikmati individu tetapi juga akan bergaung ke seluruh masyarakat.

https://jogjakota.bps.go.id

https://jogjakota.bps.go.id

BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Manusia adalah kekayaan bangsa yang sesungguhnya, pembangunan manusia menempatkan manusia sebagai tujuan akhir dari pembangunan, bukan alat dari pembangunan. Tujuan utama pembangunan adalah menciptakan lingkungan yang memungkinkan rakyat menikmati umur panjang, sehat, dan menjalankan kehidupan yang produktif. Dalam perspektif *the United Nations Development Programme* (UNDP), pembangunan manusia (*human development*) dirumuskan sebagai perluasan pilihan bagi penduduk (*enlarging the choice of people*), yang dapat dilihat sebagai proses upaya ke arah 'perluasan pilihan' dan sekaligus sebagai taraf yang dicapai dari upaya tersebut (UNDP, 1990). Pada saat yang sama, pembangunan dapat dilihat juga sebagai pembangunan (*formation*) kemampuan manusia melalui perbaikan taraf kesehatan, pengetahuan, dan ketrampilan; sekaligus sebagai pemanfaatan (*utilization*) kemampuan/ ketrampilan mereka tersebut.

Konsep pembangunan manusia jauh lebih luas pengertiannya dibandingkan konsep pembangunan ekonomi yang menekankan pada pertumbuhan ekonomi (*economic growth*), kebutuhan dasar (*basic needs*), kesejahteraan masyarakat (*social welfare*), atau pengembangan sumber daya manusia (*human resource development*). Konsep pembangunan manusia UNDP mengandung empat unsur yaitu produktivitas (*productivity*), pemerataan (*equity*), kesinambungan (*sustainability*), dan pemberdayaan (*empowerment*).

Pembangunan manusia dapat juga dilihat dari sisi pelaku atau sasaran yang ingin dicapai. Dalam kaitan ini, UNDP melihat pembangunan manusia sebagai semacam model pembangunan tentang penduduk, untuk penduduk, dan oleh penduduk, yaitu:

a. tentang penduduk: berupa investasi di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelayanan sosial lainnya;
b. untuk penduduk: berupa penciptaan peluang kerja melalui perluasan

https://kotajogja.bps.go.id

(pertumbuhan) ekonomi dalam negeri;

c. oleh penduduk: berupa upaya pemberdayaan (*empowerment*) penduduk dalam menentukan harkat manusia dengan cara berpartisipasi dalam proses politik dan pembangunan.

Dengan demikian, dalam upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat, fokus utama pembangunan tidak cukup hanya pembangunan ekonomi semata, melainkan lebih diarahkan pada pengembangan sumber daya manusia. Model pembangunan yang dianut Indonesia sebelumnya lebih berfokus pada penambahan modal fisik. Strategi tersebut ternyata menyebabkan adanya kepincangan dalam distribusi pendapatan. Selain pertumbuhan ekonomi, pembangunan manusia sangatlah penting dalam upaya mengurangi tingkat kemiskinan dan kesenjangan. Hal ini karena pendidikan dan kesehatan yang baik memungkinkan penduduk miskin untuk meningkatkan nilai asetnya mengingat aset terpenting mereka adalah tenaga mereka (Lanjouw, Pradhan, Saadah, Sayed, dan Sparrow, 2001). Sehubungan dengan itulah maka investasi pada pendidikan dan kesehatan sangat penting artinya bagi pengurangan kemiskinan.

Hal ini selaras dengan disepakatinya dokumen "*The Future We Want*" dalam *UN Conference on Sustainable Development 2012*. Kedua hal ini menjadi pendorong utama penyusunan agenda pembangunan pasca 2015 yang disepakati dalam Sidang Umum PBB pada September 2015, yaitu Agenda 2030 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB)/Sustainable Development Goals (SDGs). TPB/SDGs merupakan komitmen global dan nasional dalam upaya untuk menyejahterakan masyarakat mencakup 17 tujuan yaitu (1) Tanpa Kemiskinan; (2) Tanpa Kelaparan; (3) Kehidupan Sehat dan Sejahtera; (4) Pendidikan Berkualitas; (5) Kesetaraan Gender; (6) Air Bersih dan Sanitasi Layak; (7) Energi Bersih dan Terjangkau; (8) Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi; (9) Industri, Inovasi dan Infrastruktur; (10) Berkurangnya Kesenjangan; (11) Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan; (12) Konsumsi dan Produksi yang Bertanggung Jawab; (13) Penanganan Perubahan Iklim; (14) Ekosistem Lautan; (15) Ekosistem Daratan; (16) Perdamaian, Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh; (17) Kemitraan untuk Mencapai Tujuan.

https://jogjakota.bps.go.id

Kebutuhan akan peningkatan alokasi pengeluaran pemerintah untuk bidang sosial menjadi kian terasa sejak Indonesia mengalami krisis ekonomi sebagai dampak krisis global. Krisis tersebut bukan hanya menyebabkan melorotnya capaian pembangunan manusia tetapi juga membawa pengaruh buruk kepada tingkat kemiskinan (Booth, 1999; Fane, 2000).

UNDP sejak 1990 menggunakan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) atau *Human Development Index* (HDI) untuk mengukur keberhasilan atau kinerja (*performance*) suatu negara/wilayah dalam bidang pembangunan manusia. Dalam studi ini, indeks tersebut digunakan untuk mengukur kinerja pembangunan manusia pada tingkat kabupaten/kota, khususnya Kota Yogyakarta dalam kurun waktu 2017-2021.

1.2. Mengenal Indeks Pembangunan Manusia

Konsep pembangunan manusia memiliki dimensi yang sangat luas. Menurut UNDP upaya ke arah 'perluasan pilihan' hanya mungkin dapat direalisasikan jika penduduk paling tidak memiliki: peluang berumur panjang dan sehat, pengetahuan/ketrampilan yang memadai, dan peluang untuk merealisasikan pengetahuan yang dimiliki dalam kegiatan yang produktif (misalnya dapat bekerja dan memperoleh 'uang', sehingga memiliki daya beli). Dengan kata lain, tingkat pemenuhan ketiga unsur tersebut sudah dapat merefleksikan secara minimal tingkat keberhasilan pembangunan manusia suatu negara atau daerah/wilayah.

Untuk mengukur tingkat pemenuhan ketiga unsur di atas, UNDP menyusun suatu indeks komposit berdasarkan pada 3 (tiga) indikator yaitu Angka Harapan Hidup pada waktu lahir (*life expectancy at age 0* : e^0), Angka melek huruf penduduk dewasa (*adult literacy rate* : Lit) dan Rata-rata lama sekolah (*mean years of schooling*: MYS), dan *Purchasing Power Parity* (merupakan ukuran pendapatan yang sudah disesuaikan dengan paritas daya beli). Namun, mulai penghitungan IPM tahun 2014, Angka melek huruf penduduk dewasa diganti dengan Angka Harapan Lama Sekolah *(Expected Years of Schooling* : EYS).

Indikator pertama mengukur 'umur panjang dan sehat', dua indikator berikutnya mengukur 'pengetahuan dan ketrampilan', sedangkan indikator terakhir mengukur kemampuan dalam mengakses sumber daya ekonomi

https://jogjakota.bps.go.id

dalam arti luas. Ketiga indikator inilah yang digunakan sebagai komponen dalam penyusunan HDI yang dalam publikasi ini diterjemahkan menjadi IPM.

1.3. Maksud dan Tujuan

Kebijakan dan program pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk perlu selalu dipantau dan dievaluasi dengan berbagai indikator. IPM merupakan suatu kajian terhadap kebijakan yang telah dilakukan pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan kualitas penduduk. Dalam konteks ini tujuan penulisan laporan IPM Kota Yogyakarta adalah :

a. Mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia Kota Yogyakarta, khususnya pada periode 2017-2021.
b. Mengukur tingkat perkembangan pembangunan khususnya di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi.
c. Sebagai input/bahan yang dapat digunakan sebagai dasar pengambilan kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah, sedang, dan akan dilakukan.

1.4. Sistematika Penulisan

Laporan IPM ini terdiri dari lima (5) bab yang terdiri dari:

Bab I, Pendahuluan, yang menguraikan tentang latar belakang, maksud dan tujuan perhitungan dan penulisan IPM Kota Yogyakarta.

BabII, Metodologi, berisi tentang metode yang digunakan dalam perhitungan IPM dan indikator-indikator penyusun IPM.

BabIII, Gambaran umum daerah, berisi antara lain keadaan wilayah, penduduk, sosial, dan ekonomi Kota Yogyakarta.

Bab IV, IPM Kota Yogyakarta 2021, berisi tentang IPM Kota Yogyakarta, indikator penyusun IPM, dan perbandingan dengan daerah lain.

Bab V, Penutup, berisi tentang kesimpulan dan implikasi kebijakan terhadap bidang-bidang pembangunan yang terkait dengan pembangunan manusia.

https://jogjakota.bps.go.id

BAB II
METODOLOGI

2.1. Pembangunan Manusia

Pembangunan manusia lebih dari sekedar pertumbuhan ekonomi, akan tetapi tidak anti pertumbuhan. Dalam perspektif pembangunan manusia, pertumbuhan ekonomi bukanlah tujuan akhir. Pertumbuhan ekonomi adalah alat untuk mencapai tujuan akhir, yaitu memperluas pilihan-pilihan bagi manusia. Perhatian tidak hanya pada besar pertumbuhan, tetapi juga penciptaan dan memperkuat kaitan struktur dan kualitas dari pertumbuhan, untuk menjamin bahwa pertumbuhan diarahkan untuk mendukung perbaikan kesejahteraan manusia antara generasi sekarang dengan yang selanjutnya.

Pendekatan pembangunan manusia menggabungkan aspek produksi dan distribusi komoditas, serta peningkatan dan pemanfaatan kemampuan manusia. Pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat (pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik atau nilai-nilai cultural) dari sudut pandangan manusia. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua sektor.

Pembangunan manusia memiliki empat elemen, yaitu produktifitas, pemerataan, keberlanjutan, dan pemberdayaan. Dengan peningkatan kemampuan, kreatifitas dan produktifitas akan meningkat sehingga mereka akan menjadi agen pertumbuhan yang efektif. Pertumbuhan ekonomi harus dikombinasikan dengan pemerataan hasil-hasilnya. Pemerataan kesempatan harus tersedia baik untuk generasi saat ini maupun generasi penerus.

2.2. Indikator Pembangunan Manusia

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator gabungan dari beberapa indikator, yaitu indikator kesehatan (ditunjukkan dengan indeks angka harapan hidup waktu lahir), indikator pendidikan (ditunjukkan dengan

https://jogjakota.bps.go.id

indeks angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah), dan indikator ekonomi (ditunjukkan dengan konsumsi per kapita yang disesuaikan/indeks daya beli penduduk). Ketiga indikator ini dianggap dapat mengukur tingkat kesejahteraan dan keberhasilan pembangunan manusia di suatu wilayah.

Pada dasarnya IPM merupakan indeks yang diharapkan mampu mencerminkan kinerja pembangunan manusia sehingga dapat dibandingkan antar wilayah atau bahkan antar waktu. Fungsi utama sebagai alat banding ini sejalan dengan fungsi indeks mutu hidup (IMH) atau *Physical Quality of Life Index* (PQLI) pada masa lalu. IMH disusun dari tiga komponen, yaitu: angka kematian bayi, angka harapan hidup umur satu tahun, dan angka melek huruf. Salah satu kritik mendasar terhadap IMH adalah bahwa dua komponen pertamanya kurang lebih mengukur hal yang sama, seperti dibuktikan oleh kuatnya korelasi antar keduanya, sehingga cukup diwakili satu saja. Kelemahan inilah yang antara lain melatarbelakangi dikembangkannya IPM.

Perhitungan IPM mengadopsi formula yang diperkenalkan oleh UNDP sejak tahun 1990 yang sudah digunakan untuk mengukur upaya pencapaian pembangunan manusia suatu negara dan mempublikasikannya dalam laporan tahunan *Human Development Report*.

Pada tahun 2010 UNDP memperkenalkan penghitungan IPM dengan metode baru, dan dilakukan penyempurnaan pada tahun 2011 dan 2014.

Dengan menggunakan metode terbaru, tiga komponen penyusun IPM secara rinci dapat dilihat pada bahasan berikut:

1. Indeks kesehatan

Sebenarnya cukup banyak indikator yang dapat digunakan untuk mengukur indeks kesehatan, namun dengan pertimbangan ketersediaan data maka UNDP memilih indikator angka harapan hidup waktu lahir (AHH) sebagai salah satu komponen untuk perhitungan IPM. AHH merupakan rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir.

Angka harapan hidup dapat menggambarkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah, karena semakin baik kesehatan seseorang maka kecenderungan untuk hidup lebih lama akan semakin lama dan semakin

https://jogjakota.bps.go.id

buruk kesehatan maka kematian akan semakin dekat, walaupun hal tersebut tidak terlepas dari kekuasaan Tuhan. AHH negara berkembang lebih rendah dibandingkan AHH negara maju karena AHH dipengaruhi oleh tingkat kematian bayi yang tinggi.

Untuk mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir dipergunakan metode tidak langsung. Metode ini bersumber dari dua macam data dasar yaitu rata-rata anak lahir hidup dan anak masih hidup berdasarkan kelompok umur ibu. Prosedur perhitungan angka harapan hidup pada waktu lahir dapat dilakukan dengan menggunakan paket program Mortpak Lite atau MCPDA.

Setelah mendapatkan angka harapan hidup waktu lahir selanjutnya dihitung indeks kesehatan yaitu dengan membandingkan angka yang diperoleh dengan angka yang sudah distandarkan (dalam hal ini BPS dan UNDP telah menetapkan nilai minimum dan maksimumnya). Rumus umum untuk mendapatkan indeks angka harapan hidup :

$$I_{kesehatan} = \frac{AHH - AHH_{min}}{AHH_{maks} - AHH_{min}}$$

2. Indeks pendidikan

Angka harapan lama sekolah dan rata-rata lama sekolah diharapkan dapat mencerminkan tingkat pengetahuan dan keterampilan penduduk. Yang dimaksud dengan Harapan Lama Sekolah (HLS) adalah lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa mendatang. Dengan asumsi kemungkinan anak tersebut akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.

HLS dihitung pada usia 7 tahun ke atas karena mengikuti kebijakan pemerintah yaitu program wajib belajar. HLS dapat digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak.

Untuk menghitung angka Harapan Lama Sekolah dilakukan dengan cara :

https://jogjakota.bps.go.id

Langkah pertama	:	menghitung jumlah penduduk menurut umur (7^{th} ke atas).
Langkah kedua	:	menghitung jumlah penduduk yang masih sekolah menurut umur (7^{th} ke atas).
Langkah ketiga	:	menghitung rasio penduduk yang masih sekolah terhadap jumlah penduduk menurut umur (7^{th} ke atas). Langkah ini menghasilkan partisipasi sekolah menurut umur.
Langkah keempat	:	menghitung harapan lama sekolah, yaitu dengan menjumlahkan semua partisipasi sekolah menurut umur (7^{th} ke atas).

Formula dasar yang digunakan untuk menghitung HLS :

$$HLS_a^t = \sum_{i=d}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

Namun untuk mengakomodir penduduk yang tidak tercakup dalam Susenas, HLS dikoreksi dengan siswa yang bersekolah di pesantren, di mana sumber datanya diperoleh dari Direktorat Pendidikan Islam.

Sehingga Angka Harapan Lama Sekolah dapat dihitung dengan cara sebagai berikut :

$$HLS_a^t = FK \times \sum_{i=d}^{n} \frac{E_i^t}{P_i^t}$$

di mana :

HLS_a^t : Harapan Lama Sekolah pada umur a di tahun t
E_i^t : Jumlah penduduk usia i yang bersekolah pada tahun t
E_i^t : Jumlah penduduk usia i pada tahun t
i : usia (a,a+1,…,n)
FK : Faktor Koreksi Pesantren

Angka FK diperoleh dengan cara:

$$Rasio\ santri\ mukim = \frac{jumlahbermukim}{jumlahsantriseluruhnya}$$

$$Jumlah\ santri\ sekolah\ dan\ mukim = rasio\ santri\ mukim \times jumlah\ santri\ sekolah$$

https://jogjakota.bps.go.id

$$Faktor\ Koreksi = \frac{jumlah\ santri\ sekolah\ dan\ mukim}{jumlah\ penduduk\ umur\ 7\ tahun\ keatas} + 1$$

Indeks HLS diperoleh dengan rumus:

$$I_{HLS} = \frac{HLS - HLS_{min}}{HLS_{maks} - HLS_{min}}$$

Adapun angka rata-rata lama sekolah (RLS) adalah jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Dalam kondisi normal rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun.

Angka ini diperoleh dengan mengolah dua variabel sekaligus yaitu tingkat/kelas yang pernah/sedang diduduki dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Perhitungan rata-rata lama sekolah dilakukan secara bertahap.

Tahap pertama menyeleksi penduduk pada usia 25 tahun ke atas, tahap kedua menghitung lamanya sekolah. Jika partisipasi sekolah yaitu tidak/belum pernah bersekolah, maka lama sekolah = 0. Jika partisipasi sekolah yaitu masih bersekolah atau tidak bersekolah lagi, maka lama sekolah mengikuti tabel konversi berikut :

Tabel 2.1 Konversi Ijazah

Keterangan	Lama Sekolah
Masih bersekolah di SD s.d. S1	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir – 1
Masih bersekolah S2 atau S3	Konversi ijazah terakhir + 1 Ket: Karena di Susenas kode kelas untuk yang sedang kuliah S2 = 6 dan kuliah S3 = 7 tidak menunjukkan kelas
Tidak bersekolah lagi tetapi tidak tamat di kelas terakhir	Konversi ijazah terakhir + kelas terakhir - 1
Tidak bersekolah lagi dan tamat pada jenjang	Konversi ijazah terakhir

Selanjutnya untuk mendapatkan angka konversi berdasarkan ijazah terakhir, digunakan tabel konversi berikut ini.

https://jogjakota.bps.go.id

Tabel 2.2 Konversi Lama Sekolah Berdasarkan Ijazah Terakhir

Ijazah	Konversi Lama Sekolah (Tahun)
Tidak punya ijazah	0
SD/SDLB/MI/Paket A	6
SMP/SMPLB/MTs/Paket B	9
SMA/SMLB/MA/SMK/Paket C	12
D1/D2	14
D3/Sarjana Muda	15
D4/S1	16
S2/S3	18

Kemudian pada tahap ketiga, rata-rata lama sekolah dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$RLS = \frac{1}{n}\sum_{i=1}^{n} lama\ sekolah\ penduduk_i$$

Di mana :

RLS : Rata-rata Lama Sekolah di suatu wilayah

Lama sekolah penduduk$_i$: lama sekolah penduduk ke-*i* di suatu wilayah

N : jumlah penduduk (*i = 1, 2, 3,..., n*)

Indeks RLS diperoleh dengan rumus :

$$I_{RLS} = \frac{RLS - RLS_{min}}{RLS_{maks} - RLS_{min}}$$

Dan selanjutnya, indeks pendidikan diperoleh dengan rumus :

$$I_{pendidikan} = \frac{I_{HLS} + I_{RLS}}{2}$$

https://jogjakota.bps.go.id

3. Indeks daya beli (PPP) disesuaikan.

Dengan dimasukkannya variabel PPP sebagai ukuran kemampuan daya beli, IPM secara konseptual jelas lebih 'lengkap' dalam merefleksikan taraf pembangunan manusia daripada IMH atau PQLI. Oleh karena IMH yang tinggi hanya merefleksikan kondisi suatu masyarakat yang memiliki peluang hidup panjang (dan sehat) serta tingkat pendidikan (dan ketrampilan) yang memadai. Menurut UNDP kondisi tersebut belum memberikan gambaran yang ideal karena belum memasukkan aspek peluang kerja/berusaha yang memadai sehingga memperoleh sejumlah uang yang memiliki daya beli (*purchasing power*).

Untuk mengukur standar hidup secara ekonomi, dalam perhitungan IPM ini digunakan data konsumsi per kapita riil yang disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli penduduk. Hal ini dikarenakan lebih mudah untuk mendapatkan data pengeluaran dari pada data pendapatan. Pengeluaran per kapita disesuaikan ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli.

Rata-rata pengeluaran per kapita setahun diperoleh dari Susenas Modul, dihitung dari level provinsi hingga level kab/kota. Rata-rata pengeluaran per kapita dibuat konstan/riil dengan tahun dasar 2012=100.

Perhitungan paritas daya beli pada metode baru menggunakan 96 komoditas, dimana 66 komoditas merupakan makanan dan sisanya merupakan komoditas nonmakanan. Metode penghitungannya menggunakan Metode Rao. Penambahan jumlah komoditas terpilih sebanyak 96 dari 27 komoditas dalam penghitungan PPP karena share 27 komoditas pada metode lama terus menurun, dari 37,52 persen pada tahun 1996 menjadi 24,66 persen pada tahun 2012.

Penghitungan konsumsi per kapita riil atau tingkat daya beli penduduk dilakukan dengan cara :

https://jogjakota.bps.go.id

1. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dari Susenas

Langkah pertama	:	hitung pengeluaran per kapita (per anggota rumah tangga) untuk setiap rumah tangga.
Langkah kedua	:	hitung rata-rata pengeluaran per kapita untuk setiap provinsi atau kabupaten/kota.
Langkah ketiga	:	hitung rata-rata pengeluaran per kapita per tahun dalamribuan (Y'_{t}) = rata-rata pengeluaran per kapita per bulan x 12/1000

2. Menghitung Rata-rata Pengeluaran per Kapita dalam Harga Konstan (riil).

Menghitung nilai riil rata-rata pengeluaran per kapita per tahun (atas dasar tahun 2012) dengan rumus:

$$Y_t^* = \frac{Y_t'}{IHK_{(t,2012)}} \times 100$$

Y_t^*: rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

Y_t': rata-rata pengeluaran per kapita per tahun pada tahun t

$IHK_{(t,2012)}$: IHK tahun t dengan tahun dasar 2012

3. Menghitung Paritas Daya Beli/*PurchasingPowerParity* (PPP)

Langkah pertama, menghitung harga rata-rata komoditas terpilih dengan rumus :

$$P_i = \frac{V_i}{Q_i}$$

Keterangan:

P_i: Rata-rata harga komoditi i per satu satuan di suatu wilayah
V_i: Total value (biaya) yang dikeluarkan untuk komoditi i di suatu wilayah
Q_i: Total kuantum dari komoditi i yang dikonsumsi

Untuk harga yang tidak terdapat pada Susenas Modul Konsumsi, harga diperoleh dari IHK.

https://jogjakota.bps.go.id

Langkah kedua, menghitung paritas daya beli dengan rumus berikut:

$$Paritas\ Daya\ Beli_j = \prod_{i=1}^{m} \left(\frac{p_{ij}}{p_{ik}}\right)^{\frac{1}{m}}$$

Di mana :

p_{ij} : harga komoditas *i* di Jakarta Selatan

p_{ik} : harga komoditas *i* di kab/kota

j

m : jumlah komoditas

Langkah ketiga, menghitung pengeluaran per kapita disesuaikan dengan rumus berikut:

$$Y_t^{**} = \frac{Y_t^*}{Paritas\ Daya\ Beli}$$

Y_t^{**}: rata-rata pengeluaran per kapita disesuaikan

Y_t^*: rata-rata pengeluaran per kapita per tahun atas dasar harga konstan 2012

2.3. Metode Perhitungan IPM

Metode yang digunakan untuk perhitungan IPM tahun 2021 merupakan metode baru yang merupakan penyempurnaan dari metode sebelumnya, di mana ada beberapa perubahan dalam komponen untuk menyusun IPM tersebut.

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indeks komposit dari beberapa indeks komponennya. Komponen IPM yaitu : 1) angka harapan hidup waktu lahir (e^0), 2) harapan lama sekolah (EYS) dan rata-rata lama sekolah (MYS) yang digabung menjadi indeks pendidikan, dan 3) kemampuan daya beli (*purchasing power parity*/PPP) yang telah disesuaikan.

Untuk memperoleh angka IPM dilakukan dua tahapan berikut:

https://jogjakota.bps.go.id

1. Melakukan perhitungan indeks masing-masing komponen pembentuk IPM, yaitu indeks angka harapan hidup waktu lahir, indeks pendidikan, dan indeks daya beli. Untuk ini digunakan rumus :

$$Indeks\ X_i = \frac{X_i - X_{min}}{X_{maks} - X_{min}}$$

Keterangan :

X_i : indikator komponen IPM ke i, (dengan i = 1,2,3,4)

X_{min} : nilai minimum Xi

X_{maks} : nilai maksimum Xi (target pencapaian)

Persamaan tersebut akan menghasilkan angka dengan kisaran $0<indeks\ x_i<1$. Untuk mempermudah membaca indeks tersebut, maka persamaan itu dikalikan seratus, sehingga didapatkan $0<indeks\ x_i'<100$.

Dengan nilai minimum dan maksimum seperti pada tabel berikut:

Tabel 2.3 Nilai minimum, maksimum, dan range pencapaian indikator komponen IPM

Indikator	Nilai minimum	Nilai maksimum	Range pencapaian
Angka harapan hidup waktu lahir (e^0)	20	85	65
Harapan Lama Sekolah (HLS)	0	18	18
Rata-rata lama sekolah (MYS)	0	15	15
Konsumsi perkapita yang disesuaikan (PPP)	1.007.436	26.572.352	25.564.916

2. Melakukan perhitungan nilai IPM dengan rata-rata geometrik dari indeks kesehatan, indeks pendidikan dan indeks pengeluaran dengan rumus :

$$IPM = \sqrt[3]{I_{kesehatan} + I_{pendidikan} + I_{pengeluaran}}$$

https://jogjakota.bps.go.id

2.4. Pertumbuhan IPM

Untuk mengukur kecepatan perkembangan IPM dalam suatu kurun waktu digunakan ukuran pertumbuhan IPM per tahun. Pertumbuhan IPM menunjukkan perbandingan antara capaian yang telah ditempuh dengan capaian sebelumnya. Semakin tinggi nilai pertumbuhan, semakin cepat IPM suatu wilayah untuk mencapai nilai maksimalnya

Pertumbuhan IPM dapat dihitung dengan rumus :

$$Pertumbuhan\ IPM = \frac{(IPM_t - IPM_{t-1})}{IPM_{t-1}} \times 100$$

2.5. Sumber Data

Sumber data utama perhitungan IPM berasal dari hasil survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS) yaitu Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilakukan 2 (dua) kali dalam setahun ini yaitu Maret dan September.

Susenas bertujuan untuk mengumpulkan data yang lengkap, akurat, dan runtun waktu tentang berbagai karakteristik kependudukan dan kesejahteraan masyarakat, sehingga fakta tentang keadaan penduduk tersedia bagi pemerintah, lembaga lain, atau pengguna data lainnya yang berkeinginan untuk menggunakan sebagai bahan perencanaan, monitoring, atau evaluasi berbagai program kebijakan yang sudah dilakukan.

Survei dilakukan hanya secara sampel. Oleh karena itu hasil survei biasanya memiliki tingkat estimasi tertentu. Hasil Susenas hanya bisa digunakan untuk estimasi pada tingkat nasional, provinsi, dan kabupaten/kota.

Data sekunder dari instansi terkait baik yang sudah terhimpun dalam publikasi Kota Yogyakarta Dalam Angka maupun yang belum termuat sangat bermanfaat sebagai bahan pendukung analisis IPM Kota Yogyakarta ini, khususnya dalam aspek ketersediaan fasilitas.

https://jogjakota.bps.go.id

BAB III
GAMBARAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

3.1. Karakteristik Geografis, Administratif, dan Fisiografis

Kota Yogyakarta secara fisiografis berupa dataran rendah. Tingkat kemiringan lahan relatif datar (hanya 0-2 persen) dan berada pada ketinggian rata-rata 114 meter dari permukaan air laut (dpl). Tingkat kesuburan di Kota Yogyakarta cukup tinggi, sebagai akibat abu vulkanik yang dihasilkan oleh gunung Merapi pada waktu lampau. Meskipun demikian, lahan pertanian di Kota Yogyakarta hampir tidak ada lagi, sebagian besar wilayah dimanfaatkan untuk pemukiman (BPS Kota Yogyakarta, 2013). Sebagai ibukota provinsi dan dengan berbagai fasilitas pelayanan yang tersedia maka banyak penduduk dari kabupaten lain yang mengadu nasib di sini sehingga tidak mengherankan apabila kepadatannya sangat tinggi. Pada tahun 2021, kepadatan penduduk kota ini adalah 11.579 jiwa per km^2.

Letak wilayah Kota Yogyakarta terbentang antara 110”24”19” sampai 110” 28”53” Bujur Timur dan 07”15’24” sampai 07” 49’ 26” Lintang Selatan. Di wilayah kota tersebut mengalir tiga jalur sungai dari arah utara ke selatan, yaitu Sungai Winongo yang terletak di bagian barat kota, Sungai Code terletak di bagian tengah dan Sungai Gadjah Wong terletak di bagian timur.

Kota Yogyakarta yang luasnya 32,50 km^2, di sebelah utara dibatasi oleh Kabupaten Sleman, di sebelah timur dibatasi oleh Kabupaten Sleman dan Bantul, di sebelah selatan oleh Kabupaten Bantul dan sebelah barat oleh Kabupaten Bantul dan Sleman. Kedudukan Kota Yogyakarta sejak kemerdekaan hingga masa kini menjadi Ibukota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Selain itu Kota Yogyakarta pada masa kini juga menjadi wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta yang dipimpin oleh seorang Walikota. Wilayah Pemerintah Kota Yogyakarta terbagi atas 14 wilayah Kecamatan, 45 Kelurahan, 616 RW (Rukun Warga) dan 2.532 RT (Rukun Tangga). Pembagian wilayah dan luas wilayah kota tersebut dapat dilihat pada Tabel 3.1.

https://jogjakota.bps.go.id

Tabel 3.1 Pembagian Wilayah dan Luas Wilayah
Kota Yogyakarta Tahun 2021

Kecamatan	Luas (km^2)	%	Kelurahan	RW	RT
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. Mantrijeron	2,61	8,03	3	55	231
2. Kraton	1,40	4,31	3	43	175
3. Mergangsan	2,31	7,11	3	60	219
4. Umbulharjo	8,12	24,98	7	87	343
5. Kotagede	3,07	9,45	3	40	165
6. Gondokusuman	3,99	12,28	5	66	271
7. Danurejan	1,10	3,38	3	41	155
8. Pakualaman	0,63	1,94	2	19	83
9. Gondomanan	1,12	3,45	2	31	110
10. Ngampilan	0,82	2,52	2	21	120
11. Wirobrajan	1,76	5,42	3	34	165
12. Gedongtengen	0,96	2,95	2	36	138
13. Jetis	1,70	5,23	3	37	166
14. Tegalrejo	2,91	8,96	4	46	191
Kota Yogyakarta	32,50	100,00	45	616	2.532

Sumber: Bagian Tata Pemerintahan Setda Kota Yogyakarta

https://jogjakota.bps.go.id

3.2. Karakteristik Penduduk

Jumlah penduduk Kota Yogyakarta memiliki kecenderungan meningkat dari sekitar 312,7 ribu jiwa pada tahun 1961 hingga pada tahun 1990 tercatat sebesar 412,1 ribu jiwa. Setelah periode tersebut, hasil sensus penduduk tahun 2000 dan 2010 menunjukkan adanya penurunan jumlah penduduk. Pada periode 1990-2010 terdapat penurunan jumlah penduduk Kota Yogyakarta. Hal ini tampaknya berkaitan dengan migran keluar yang besar akibat krisis ekonomi yang terjadi pada 1997-1998 dan pada tahun 2010 tidak kembali lagi ke Kota Yogyakarta. Pada periode 2000-2010, jumlah penduduk masih menurun sekitar 0,22 persen per tahun. Hal ini dianggap

wajar karena adanya pergeseran perguruan tinggi dan perumahan di sekitar wilayah Kota Yogyakarta, sehingga mendorong terjadinya migrasi ke luar Kota Yogyakarta. Lalu, pada sensus pendukuk tahun 2020 tercatat jumlah penduduk kota ini sebanyak 376.324 jiwa dengan 183.251 jiwa adalah penduduk laki-laki dan 193.073 jiwa penduduk perempuan. Nilai ini menurun daripada jumlah penduduk pada tahun 2010 yang sebesar 388.627 jiwa. Apabila dihitung rasio jenis kelaminnya, pada tahun 2020 terdapat 95 laki-laki dari setiap 100 perempuan. Perkembangan jumlah penduduk secara lebih lengkap dapat dilihat pada Tabel 3.2.

Tabel 3.2 Perkembangan Penduduk Kota Yogyakarta, 1961-2020

Karakteristik	1961	1971	1980	1990	2000	2010	2020
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
Jumlah penduduk (000)	312,7	340,5	398,2	412,1	397,7	388,6	376,6
Pertumbuhan penduduk (% / tahun)	-	1,07	1,72	0,34	-0,39	-0,21	-0,38

Sumber : Penduduk Kota Yogyakarta Hasil Sensus Penduduk 1961-2020.

https://jogjakota.bps.go.id

Dari periode waktu 1961 hingga 1990 pertumbuhan penduduk Kota Yogyakarta selalu positif. Setelah periode tersebut, pertumbuhannya menurun hingga di bawah nol persen. Pada periode 2010-2020, nilai persentase pertumbuhan penduduk ada di angka -0,38%. Nilai ini kurang dari nol sehingga memperlihatkan penurunan jumlah penduduk pada periode tersebut. Kota Yogyakarta sebagai pusat pertumbuhan dan pemusatan ekonomi serta pusat pendidikan tetap menarik untuk didatangi, tetapi tidak cukup untuk membuatnya menarik menjadi tempat tinggal.

Penduduk Kota Yogyakarta tersebar di 14 kecamatan yang ada, Umbulharjo memiliki jumlah penduduk terbesar dibandingkan kecamatan lain dengan jumlah penduduk mencapai sekitar 68 ribu. Hal ini wajar karena luas

wilayah kecamatan tersebut relatif lebih luas daripada kecamatan lain di kota ini. Kepadatan penduduk lebih terkonsentrasi di Kecamatan Ngampilan, Gedongtengen, dan Danurejan. Dua kecamatan pertama secara geografis tampak diuntungkan karena terletak dekat pada akses jalan utama menuju Kecamatan Danurejan yang merupakan pusat pemerintahan, perkembangan ekonomi, dan pembangunan pada umumnya di wilayah Kota Yogyakarta.

Tabel 3.3 Penduduk Menurut Jenis Kelamin dan Kecamatan dan Kepadatan Penduduk Kota Yogyakarta Tahun 2021

Kecamatan	Laki-laki	perempuan	Jumlah	Kepadatan Penduduk
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Mantrijeron	16.356	17.392	33.748	12.930
2. Kraton	8.766	9.331	18.097	12.926
3. Mergangsan	14.072	14.839	28.911	12.516
4. Umbulharjo	33.531	33.045	68.576	8.445
5. Kotagede	16.578	17.116	33.694	10.975
6. Gondokusuman	17.935	19.207	37.142	9.309
7. Danurejan	9.186	9.628	18.814	17.104
8. Pakualaman	4.388	4.815	9.203	14.608
9. Gondomanan	6.251	6.618	12.869	11.490
10. Ngampilan	7.580	7.870	15.450	18.841
11. Wirobrajan	12.128	12.759	24.887	14.140
12. Gedongtengen	8.027	8.555	16.582	17.273
13. Jetis	11.410	12.115	23.525	13.838
14. Tegalrejo	17.043	17.783	34.826	11.968
Kota Yogyakarta	183.251	193.073	476.324	11.579

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka, 2022

https://jogjakota.bps.go.id

3.3. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu usaha untuk meningkatkan kecerdasan dan keterampilan. Pendidikan yang rendah dapat mengakibatkan

munculnya berbagai kendala dalam memperoleh pekerjaan atau bahkan menjadi hambatan dalam perkembangan bangsa atau wilayah. Semakin tinggi jenjang pendidikan suatu masyarakat, maka biasanya akan semakin baik pula kualitas hidup manusianya.

Angka partisipasi sekolah merupakan suatu indikator untuk mengukur proporsi anak yang bersekolah pada suatu kelompok usia sekolah tanpa memperhatikan jenjang pendidikan yang sedang diikuti.

Tabel 3.4 menunjukkan Angka Partisipasi Sekolah penduduk usia wajar 12 tahun di Kota Yogyakarta pada tahun 2017-2021. APS pada kelompok usia 7-12 tahun pada 2021 mencapai 99,82 persen, APS pada kelompok usia 13-15 tahun lebih tinggi yaitu mencapai menjadi 99,92, sedangkan APS pada kelompok usia 16-18 tahun adalah 96,81. Artinya, ada 0,18 persen penduduk pada umur 7-12 tahun yang tidak terdaftar di sekolah, sementara untuk kelompok 13-15 tahun ada sekitar 0,08 persen penduduk yang tidak terdaftar di sekolah dan pada kelompok 16-18 tahun terdapat sekitar 0,19 persen yang tidak terdaftar di sekolah.

Tabel 3.4 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Penduduk Usia Wajar 12 Tahun di Kota Yogyakarta, 2017-2021

Karakteristik	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka partisipasi sekolah					
7-12	99,22	99,67	99,80	99,93	99,82
13-15	98,65	99,21	99,43	99,62	99,92
16-18	92,82	98,32	97,72	96,26	96,81

Sumber : Yogyakarta Dalam Angka, 2022

Sementara itu, untuk menilai perkembangan sarana pendidikan, daya tampung sekolah dan banyaknya murid yang diampu oleh satu guru haruslah ideal agar proses belajar mengajar dapat berjalan dengan baik. Tabel 3.5

https://jogjakota.bps.go.id

menunjukkan bahwa rasio murid terhadap sekolah pada tingkat SD dan SLTP menunjukkan suasana yang cukup ideal.

Rasio Murid-Guru dapat menjelaskan ketersediaan tenaga pendidik. Pada tahun ajaran 2020/2021, seorang guru rata-rata mengajar 15 murid pada jenjang SD. Pada jenjang SLTP, seorang guru rata-rata mengajar 14 murid. Sedangkan, pada jenjang SLTA, seorang guru rata-rata mengajar 12 murid. Semakin kecil rasio murid-guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh satu guru sehingga kegiatan belajar mengajar dapat lebih efektif dan diharapkan kualitas pelayanan pendidikan semakin baik. Nilai rasio murid-guru pada tahun ajaran 2020/2021 pada setiap jenjang pendidikan di Kota Yogyakarta menurun jika dibandingkan dengan tahun ajaran 2019/2020 sehingga dapat disimpulkan bahwa jumlah tenaga pendidik semakin mencukupi kebutuhan pendidikan di Kota Yogyakarta.

Tabel 3.5 Rasio Murid-Sekolah dan Rasio Murid-Guru
di Kota Yogyakarta, 2019/2020-2020/2021

Tingkat Pendidikan	Rasio Murid-Sekolah		Rasio Murid-Guru	
	2019/2020	2020/2021	2019/2020	2020/2021
(01)	(02)	(03)	(04)	(05)
SD	255	251	17	15
SLTP	352	367	14	14
SLTA	473	474	13	12

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, 2021

https://jogjakota.bps.go.id

3.4. Kesehatan

Keadaan kesehatan masyarakat merupakan salah satu determinan pokok yang menentukan derajat kesehatan penduduk atau kualitas manusia. Pembangunan di bidang kesehatan mempunyai peranan dalam menekan angka mortalitas dan meningkatkan harapan hidup. Dalam sistem kesehatan nasional telah digariskan upaya penataan untuk meningkatkan kemampuan derajat kesehatan yang optimal sebagai perwujudan kesejahteraan umum.

Sebagai upaya pembangunan di bidang kesehatan di Kota Yogyakarta telah diusahakan perbaikan jaringan pelayanan kesehatan antara lain dengan Puskesmas yang didukung oleh rumah sakit dan peran serta masyarakat yang meningkat. Jumlah rumah sakit umum di kota ini pada tahun 2021 mencapai 12 buah. Kapasitas tempat tidur rumah sakit pada tahun 2021 adalah 1.584 set. Jumlah ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan kapasitas tempat tidur rumah sakit di tahun 2019 yang sebesar 1.707 set.

Aspek kesehatan yang juga penting adalah kondisi rumah tinggal dan kondisi lingkungan yang tercermin dari jenis lantai dan pemilikan tempat buang air besar. Aspek tersebut mempengaruhi langsung derajat kesehatan masyarakat. Pada tahun 2021, rumah tangga yang menghuni rumah berlantai tanah hanya tinggal sekitar 0,43 persen (tabel 3.6).

Tabel 3.6 Persentase Rumah Tangga Berlantai Tanah dan Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Air Bersih di Kota Yogyakarta, 2017-2021

Uraian	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
% rumah tangga dengan rumah berlantai tanah	0,19	0,21	0,43	0,15	0,43
% rumah tangga yang memiliki akses air bersih	100	100	99,56	100	100

Sumber : Susenas, 2017-2021

https://jogjakota.bps.go.id

Untuk rumah tangga yang mengakses ke air bersih yang berupa air kemasan, leding, pompa, sumur/mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan akhir lebih dari 10 meter di Kota Yogyakarta pada 2021 sudah mencapai 100 persen. Hal ini menunjukkan bahwa seluruh rumah tangga di Kota Yogyakarta telah mampu mengakses air bersih.

3.5. Perekonomian

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) merupakan salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengetahui perkembangan perekonomian di suatu wilayah..

Tabel 3. 7. Distribusi Persentase PDRB Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Berlaku, 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020*	2021**
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	0,15	0,15	0,15	0,15	0,15
Pertambangan dan Penggalian	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Industri Pengolahan	13,47	13,27	13,15	13,08	12,57
Pengadaan Listrik dan Gas	0,22	0,22	0,22	0,22	0,22
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	0,15	0,14	0,14	0,15	0,15
Konstruksi	7,74	7,93	7,86	6,75	6,97
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	7,49	7,55	7,49	7,35	7,17
Transportasi dan Pergudangan	3,96	3,92	4,03	3,66	3,70
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	13,55	13,55	13,79	10,92	11,03
Informasi dan Komunikasi	10,45	10,42	10,27	12,52	13,42
Jasa Keuangan dan Asuransi	6,65	6,72	6,84	6,96	6,80
Real Estate	9,10	9,09	9,16	9,74	9,36
Jasa Perusahaan	1,08	1,08	1,09	0,94	0,97
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	10,42	10,32	10,07	10,39	10,16
Jasa Pendidikan	9,10	9,15	9,22	10,04	9,91
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	3,78	3,77	3,79	4,82	4,85
Jasa Lainnya	2,69	2,72	2,73	2,30	2,58
PDRB	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00

Sumber: BPS Provinsi DIY

*) angka sementara ** angka sangat sementara

https://jogjakota.bps.go.id

PDRB tersebut dapat juga sebagai sarana untuk mengetahui sektor mana saja yang dapat dikembangkan serta mampu menampung tenaga kerja yang besar sehingga dapat menjawab permasalahan ketenagakerjaan yang ada.

Lapangan usaha yang konsisten memiliki kontribusi cukup besar dari tahun 2017 hingga 2021 adalah Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Informasi dan Teknologi. Kontribusi sektor tersier ini relatif besar dikarenakan fungsi Yogyakarta sebagai kota pariwisata dan kota pelajar sehingga jasa-jasa tersebut sangat dibutuhkan.

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan dengan pertambahan barang dan jasa di suatu wilayah. Untuk menghitung pertumbuhan ekonomi digunakan PDRB atas dasar harga konstan tahun tertentu, sehingga didalamnya sudah terbebas dari pengaruh inflasi.

https://jogjakota.bps.go.id

Gambar 3.1 Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten/Kota, 2017-2021

Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mengalami perubahan fluktuatif dalam tiga tahun terakhir. Pada tahun 2017 pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta sekitar 5,24 persen, pada tahun 2018 menjadi 5,49 persen, Pada tahun 2019 tumbuh lebih cepat menjadi 5,96 persen, tahun 2020

mengalami pertumbuhan negatif pada angka -2,42 persen dan tahun 2021 mengalami pertumbuhan positif sebesar 5,09 persen. Bila dibandingkan dengan empat kabupaten lain di D.I. Yogyakarta pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta tahun 2021 berada pada posisi ketiga di setelah Sleman dan Gunungkidul.

Untuk menilai kemakmuran suatu wilayah secara makro ekonomi biasanya dipakai PDRB per kapita. PDRB per kapita merupakan suatu konsep rata-rata pendapatan per orang dari nilai tambah bruto suatu wilayah.

Gambar 3.2 PDRB per Kapita Kota Yogyakarta, 2017-2021
(Juta Rupiah)

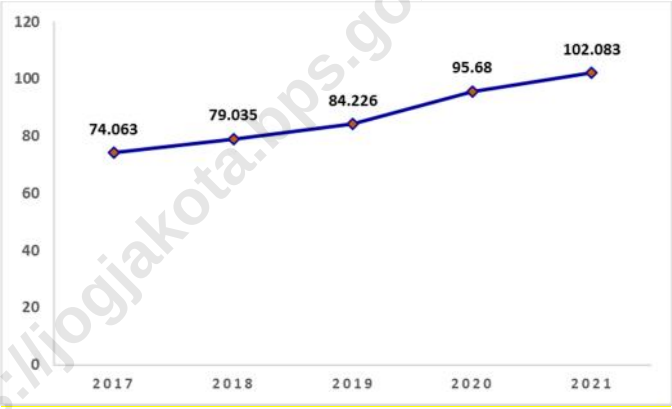

https://jogjakota.bps.go.id

Konsep PDRB per kapita masih kasar menggambarkan pendapatan per kapita karena masih terkandung nilai pendapatan netto yang mengalir dari/ke daerah lain, pajak tak langsung, dan penyusutan. Pada tahun 2021 PDRB per kapita atas dasar harga berlaku Kota Yogyakarta mencapai sekitar 102,083 juta rupiah setahun, meningkat bila dibandingkan pada tahun 2020 yang sebesar 95,68 juta rupiah.

BAB IV
IPM KOTA YOGYAKARTA

4.1. Perkembangan IPM Kota Yogyakarta

IPM sebagai alat ukur tingkat pencapaian pembangunan manusia merupakan indeks gabungan dari tiga komponen yang mengindikasikan kualitas sumber daya manusia. Jika ketiga komponen tersebut memiliki nilai yang baik, tentunya sumber daya manusia secara umum juga memiliki kualitas yang baik. Bagi suatu wilayah, angka IPM yang diperoleh menggambarkan kemajuan pembangunan manusia di daerah tersebut dan merupakan tantangan yang harus dihadapi serta upaya apa yang diperlukan untuk meningkatkan kualitas pembangunan manusia.

Tabel 4.1 IPM Kota Yogyakarta Menurut Komponen
Tahun 2017-2021

Indikator	2017	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Angka harapan hidup saat lahir (tahun)	74,35	74,45	74,56	74,65	74,76
Harapan Lama Sekolah	16,82	17,05	17,28	17,43	17,60
Rata-rata lama sekolah (tahun)	11,43	11,44	11,45	11,46	11,72
Rata-rata pengeluaran riil perkapita disesuaikan (ribu rupiah)	18.005	18.629	19.125	18.678	18.801
Indeks Pembangunan Manusia (IPM)	85,49	86,11	86,65	86,61	87,18

Sumber: Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta, 2021

IPM dan komponennya dapat dilihat pada Tabel 4.1 yang memperlihatkan seberapa besar tingkat pencapaian suatu daerah di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi. IPM Kota Yogyakarta pada tahun 2021 sebesar 87,18. Nilai ini meningkat bila dibandingkan dengan kondisi pada

https://jogjakota.bps.go.id

tahun 2019 dan 2020 yang masing-masing sebesar 86,65 dan 86,61. Bila diukur berdasar skala internasional, nilai IPM ini termasuk dalam kategori tinggi (IPM di atas 80).

Selama lima tahun terakhir, Angka Harapan Hidup penduduk Yogyakarta terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2017, Angka Harapan Hidup di kota ini sebesar 74,35. Nilai ini terus meningkat hingga tahun 2021 yang ada pada angka 74,76. Hal ini merupakan salah satu indikasi bahwa kualitas kesehatan penduduk Kota Yogyakarta semakin baik.

Gambar 4.1 Angka Harapan Hidup

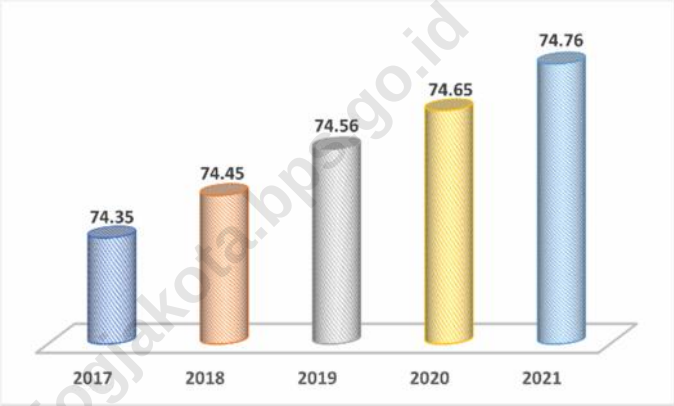

https://jogjakota.bps.go.id

Kualitas kesehatan yang semakin baik ini ditunjang kemudahan dan kesadaran penduduk dalam mengakses dan memanfaatkan tenaga dan fasilitas kesehatan modern yang memadai, baik dokter praktek maupun rumah sakit dan puskesmas. Praktek dokter dan puskesmas yang telah tersedia di setiap kecamatan di Yogyakarta memberi kemudahan bagi masyarakat untuk menjangkaunya. Selain itu, setiap rumah sakit, baik milik pemerintah maupun swasta juga relatif mudah dijangkau bagi masyarakat Yogyakarta.

Kesadaran masyarakat dalam menggunakan layanan kesehatan sangat ditunjang adanya berbagai jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan yang telah dimiliki antara lain BPJS maupun BPJS PDPD (Penduduk yang Didaftarkan Pemerintah Daerah).

BPJS Kesehatan merupakan program jaminan kesehatan yang diluncurkan pemerintah pusat, di mana penduduk yang ingin menjadi peserta harus mendaftar melalui kantor BPJS Kesehatan di daerah masing-masing. Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai pemegang kartu ASKES, secara otomatis menjadi peserta BPJS Kesehatan. Bagi penduduk yang menjadi peserta BPJS Kesehatan diwajibkan membayar premi setiap bulan yang besarnya sesuai dengan kelas yang dipilih. Sementara BPJS PDPD merupakan program yang Pemerintah Kota Yogyakarta bagi warganya agar mendapat layanan BPJS Kesehatan.

Dengan adanya berbagai jaminan kesehatan tersebut, kesadaran masyarakat untuk periksa maupun berobat ke fasilitas kesehatan baik puskesmas maupun rumah sakit semakin tinggi. Hal ini dibuktikan dengan adanya fenomana berbagai fasilitas kesehatan selalu ramai dikunjungi masyarakat yang akan berobat, tingkat okupansi ruang inap di berbagai rumah sakit meningkat tajam, bahkan ada pasien yang terpaksa ditolak atau harus menunggu ketika harus menjalani rawat inap.

Meningkatnya akses masyarakat terhadap fasilitas kesehatan akhirnya berpengaruh terhadap peningkatan kualitas kesehatan bagi penduduk Kota Yogyakarta.

Hal lain yang menonjol di Yogyakarta adalah rendahnya rumah tangga yang tidak menggunakan garam yang mengandung yodium dalam konsumsi sehari-harinya. Sejak 1996 penduduk Kota Yogyakarta sudah mendekati tahap *Universal Salt Yodization* (USY), yang artinya minimal 90 persen penduduk telah mengkonsumsi garam yodium dengan kandungan cukup (lebih dari 30 ppm). Hal ini mengingat pada waktu itu persentase rumah tangga dengan kandungan yodium pada garam yang dikonsumsi masih kurang dari 30 ppm walaupun garamnya sudah beryodium adalah sekitar 8 persen.

Dalam bidang pendidikan, kota ini juga relatif maju bila dilihat dari rasio murid-guru dan rasio murid-sekolah yang cukup ideal. Pada tahun ajaran 2020/2021, seorang guru rata-rata mengajar 15 murid pada jenjang SD. Pada jenjang SLTP, seorang guru rata-rata mengajar 14 murid. Sedangkan, pada jenjang SLTA, seorang guru rata-rata mengajar 12 murid. Semakin kecil rasio

https://jogjakota.bps.go.id

murid-guru maka semakin sedikit murid yang dibimbing oleh satu guru sehingga kegiatan belajar mengajar dapat lebih efektif dan diharapkan kualitas pelayanan pendidikan semakin baik.

Gambar 4.2 Harapan Lama Sekolah

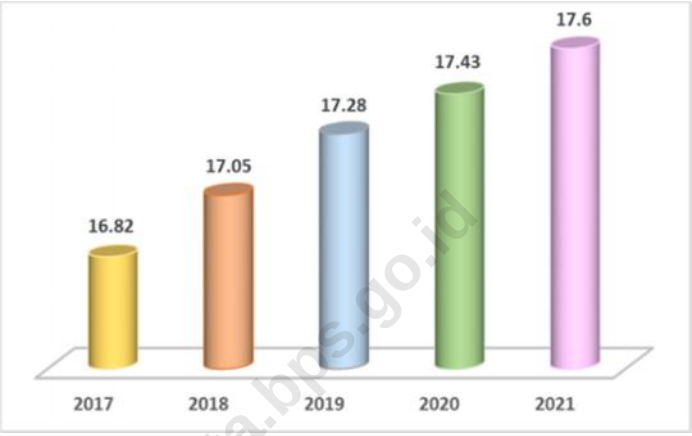

Angka Harapan Lama Sekolah tahun 2017 hingga tahun 2021 selalu mengalami peningkatan. Pada tahun 2021 angka Harapan Lama Sekolah sebesar 17,6. Hal ini berarti bahwa lamanya sekolah yang diharapkan akan dirasakan oleh anak sejak usia 7 (tujuh) tahun di Yogyakarta adalah 17,6 tahun.

Yogyakarta yang merupakan ibukota pemerintah D.I. Yogyakarta dan dikenal sebagai kota pelajar telah begitu banyak menyediakan fasilitas pendidikan yang memadai. Di samping itu, berbagai program pemerintah dalam rangka peningkatan mutu pendidikan di Yogyakarta turut berperan dalam meningkatkan kesadaran generasi penerus terutama anak-anak untuk menempuh pendidikan yang lebih baik. Program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) yang telah lama diluncurkan pemerintah, dirasakan sangat membantu siswa dalam hal biaya pendidikan karena dengan adanya program tersebut, siswa terutama dari sekolah negeri dibebaskan dari biaya SPP yang biasanya dibayarkan tiap bulan, termasuk biaya-biaya pendidikan lainnya.

Bantuan Siswa Miskin (BSM) yang juga merupakan program pemerintah secara nasional telah berperan dalam membantu para siswa dari

https://jogjakota.bps.go.id

keluarga kurang mampu untuk tetap melanjutkan pendidikan dan terhindar dari putus sekolah. Penerima BSM merupakan siswa yang berasal dari keluarga kurang mampu diantaranya orang tua penerima Kartu Perlindungan Sosial (KPS), Program Keluarga Harapan (PKH), anak yatim piatu dan sebagainya. Bantuan yang diterima oleh siswa penerima BSM ini ditujukan untuk membantu kebutuhan pribadi siswa dalam menunjang kegiatan sekolah antara lain pembelian seragam sekolah, sepatu sekolah, biaya transportasi sekolah dan sebagainya.

Adanya BOS dan BSM yang telah diterima masyarakat khususnya para siswa tersebut cukup berpengaruh terhadap peningkatan nilai harapan lama sekolah di Yogyakarta.

Angka rata-rata lama sekolah (RLS) di Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2021 selalu mengalami peningkatan. Bahkan, pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah meningkat cukup besar menjadi 11,72. Hal ini berarti bahwa rata-rata jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk Yogyakarta dalam menjalani pendidikan formal adalah selama 11,41 tahun. Nilai ini menunjukkan bahwa program wajib belajar 9 tahun yang dicanangkan pemerintah telah tercapai.

https://jogjakota.bps.go.id

Gambar 4.3. Rata-rata Lama Sekolah

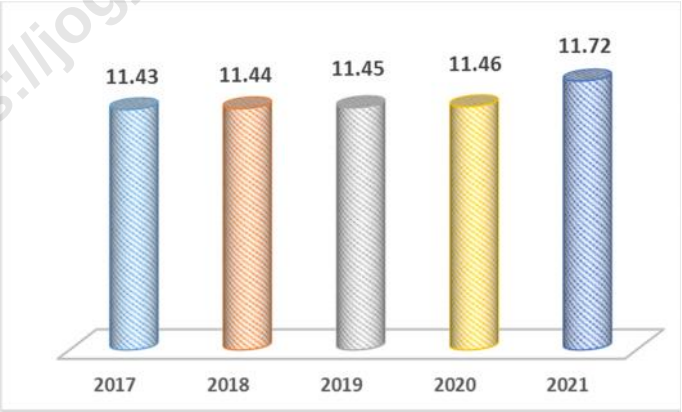

Rata-rata pengeluaran perkapita penduduk Yogyakarta dari tahun 2017 hingga 2021 mengalami fluktuasi. Pada 2017, pengeluaran per kapita ada di angka 18.005 dan terus meningkat hingga 2019 di angka 19.125. Namun, pada 2020, nilai pengeluaran perkapita mengalami penurunan menjadi 18.678. Hal ini terjadi karena pandemi Covid-19 yang melanda ,anyaknya kasus PHK karena krisis sebagai akibat dari pandemi ini mengharuskan masyarakat untuk menghemat pengeluaran. Akibatnya, daya beli masyarakat menurun sehingga rata-rata pengeluaran per kapita juga mengalami penurunan.

Gambar 4.4. Rata-rata Pengeluaran

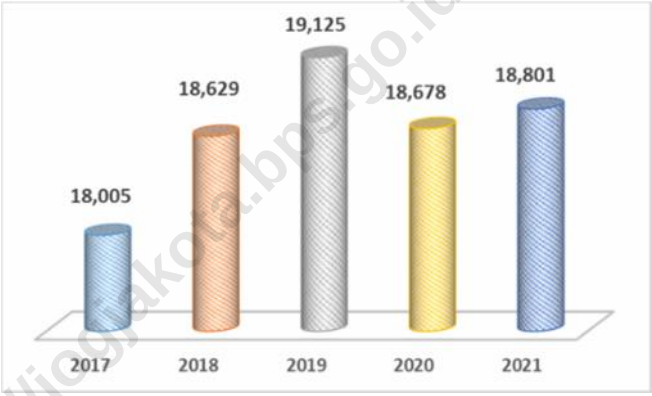

https://jogjakota.bps.go.id

Namun, pada 2021, rata-rata pengeluaran masyarakat Kota Yogyakarta adalah sebesar 18.801, meningkat jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Hal ini mengindikasikan bahwa ekonomi masyarakat mulai bangkit sehingga daya beli masyarakat juga meningkat.

Angka Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Yogyakarta cenderung mengalami peningkatan, kecuali pada tahun 2020. Hal ini bisa terjadi karena adanya wabah Covid-19. Dalam kesehatan, adanya wabah ini tentunya membuat banyak kasus kematian. Hal ini berimbas pada Angka Harapan Hidup yang semakin kecil. Selain itu, adanya wabah ini telah membuat banyak masyarakat kehilangan pekerjaan. Hal ini tentunya berpengaruh pada

tingginya kemiskinan dan rendahnya daya beli masyarakat. Hal tersebut membuat pembangunan manusia mengalami penurunan.

Namun, pada 2021, keadaan mulai membaik, nilai IPM masyarakat Kota Yogyakarta pun juga mengalami peningkatan yang cukup pesat. Bahkan, nilai IPM 2021 yang sebesar 87,18 merupakan pencapaian tertinggi selama lima tahun terakhir.

Gambar 4.5 Indeks Pembangunan Manusia

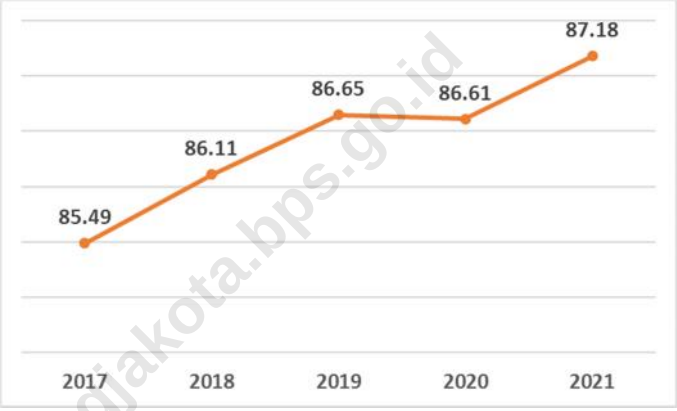

https://jogjakota.bps.go.id

4.2. Perbandingan IPM antar Wilayah

Kota Yogyakarta yang merupakan ibukota dari Pemerintahan D.I. Yogyakarta, peringkat IPM-nya selalu menempati posisi pertama atau nilainya terbesar bila dibandingkan dengan kabupaten lain di provinsi ini. Pada periode 2020-2021 masih terjadi kenaikan nilai IPM. Bila dibandingkan dengan kabupaten lain di D.I. Yogyakarta, perkembangan IPM di Kota Yogyakarta paling besar.

Tabel 4.2 Perbandingan IPM antar Kabupaten/Kota
di Provinsi D.I. Yogyakarta, 2020-2021

Wilayah	IPM	
	2020	2021
(1)	(2)	(3)
1. Kulonprogo	74,46	74,71
2. Bantul	80,01	80,28
3. Gunungkidul	69,98	70,16
4. Sleman	83,84	84,00
5. Yogyakarta	86,61	87,18
D.I. Yogyakarta	79,97	80,22

Sumber: BPS Provinsi DIY

https://jogjakota.bps.go.id

4.3. Perkembangan Indikator Komponen IPM

1. Angka harapan hidup

Angka harapan hidup menggambarkan derajat kesehatan suatu wilayah. Semakin tinggi angka harapan hidup semakin tinggi pula tingkat kesehatan yang telah dicapai oleh penduduk di suatu wilayah. Bila dilihat dari indikator angka harapan hidup waktu lahir menunjukkan bahwa angka di Yogyakarta ini terpanjang ketiga (setelah Kulonprogo dan Sleman) untuk D.I. Yogyakarta.

Pada tahun 2021, peluang hidup penduduk yang baru lahir di Kota Yogyakarta mencapai sekitar 74,76 tahun. Keadaan ini terkait pola hidup sehat masyarakat dan rendahnya angka kematian bayi, yang menurut perkiraan BPS *et al*. (2004) adalah sekitar 19 per 1000 kelahiran hidup. Hal ini karena tersedianya fasilitas pelayanan kesehatan yang memadai dan cukup

mudah untuk dicapai, serta kesadaran masyarakat yang tinggi untuk memanfaatkannya.

Tabel 4.3a Perbandingan Indikator Penyusun IPM Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta Tahun 2020-2021

Wilayah	Angka harapan hidup (tahun)		Harapan Lama Sekolah (tahun)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kulonprogo	75,24	75,27	14,26	14,27
2. Bantul	73,86	73,89	15,17	15,38
3. Gunungkidul	74,12	74,19	12,97	12,98
4. Sleman	74,81	74,92	16,73	16,74
5. Yogyakarta	74,65	74,76	17,43	17,60
D.I. Yogyakarta	74,99	75,04	15,59	15,64

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

2. Harapan Lama Sekolah dan Rata-rata Lama Sekolah

Angka Harapan Lama Sekolah (HLS) bagi penduduk Yogyakara mulai usia 7 tahun pada tahun 2021 sebesar 17,60, mengalami kenaikan bila dibanding tahun 2020 yang nilainya 17,43. Angka HLS Yogyakarta paling tinggi bila dibandingkan dengan 4 (empat) kabupaten di D.I. Yogyakarta, diikuti Sleman pada posisi kedua dan Bantul posisi ketiga.

3. Kemampuan Daya Beli

Untuk mengukur standar hidup layak, data dasar PDRB per kapita belum cukup mewakili informasi yang diperlukan. Oleh karena itu, pada

https://jogjakota.bps.go.id

perhitungan IPM ini digunakan ukuran konsumsi per kapita riil yang telah disesuaikan untuk mengukur kemampuan daya beli masyarakat. Nilai tingkat daya beli menunjukkan tingkat kemampuan daya beli penduduk.Semakin besar nilai indeks daya beli mengindikasikan tingkat kesejahteraan penduduk semakin baik.

Tabel 4.3b Perbandingan Indikator Penyusun IPM Kabupaten/Kota di D.I. Yogyakarta, 2019-2020 (Lanjutan)

Wilayah	Rata-rata lama sekolah (tahun)		Pengeluaran riil perkapita disesuaikan(000 Rp)	
	2020	2021	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1. Kulonprogo	8,86	9,02	10.041	10.069
2. Bantul	9,55	9,57	15.517	15.545
3. Gunungkidul	7,21	7,30	9.486	9.505
4. Sleman	10,91	10,92	15.926	16.060
5. Yogyakarta	11,46	11,72	18.678	18.801
D.I. Yogyakarta	9,55	9,64	14.015	14.111

Sumber: BPS Provinsi DIY, 2021

Pada 2021, indeks daya beli penduduk atau konsumsi riil per kapita penduduk Kota Yogyakarta mencapai Rp. 18.801 ribu, lebih tinggi bila dibandingkan dengan keadaan pada tahun sebelumnya yang sebesar Rp. 18.678, angka ini tertinggi dibanding dengan kabupaten/kota lain di D.I.Yogyakarta, di susul Sleman dan Bantul. Hal ini memberi gambaran bahwa terjadi peningkatan daya beli masyarakat Yogyakarta pada setahun terakhir.

4. Indikator Pendukung IPM

Selain informasi tentang indeks pembangunan manusia dan keadaan masing-masing dari indikator tunggal penyusun indeks pembangunan manusia, menarik pula dilihat indikator pendukung IPM lain untuk memberikan penjelasan lebih jauh untuk mendapatkan determinan yang sesuai. Dengan diketahuinya berbagai indikator ini akan memberikan

https://jogjakota.bps.go.id

gambaran yang jelas potensi dan sektor apa yang perlu peningkatan dalam pembangunan. Secara umum, variabel tersebut dapat dibagi menjadi tiga aspek besar yaitu karakteristik wilayah, kebijakan pembangunan sosial, serta kondisi sosial ekonomi dan demografi masyarakat. Dengan demikian, prioritas kebijakan dan program pembangunan serta masukan dalam menggalang koordinasi lintas sektoral menjadi lebih terarah.

Gambar 4.6 Skema Analisis Penentu IPM

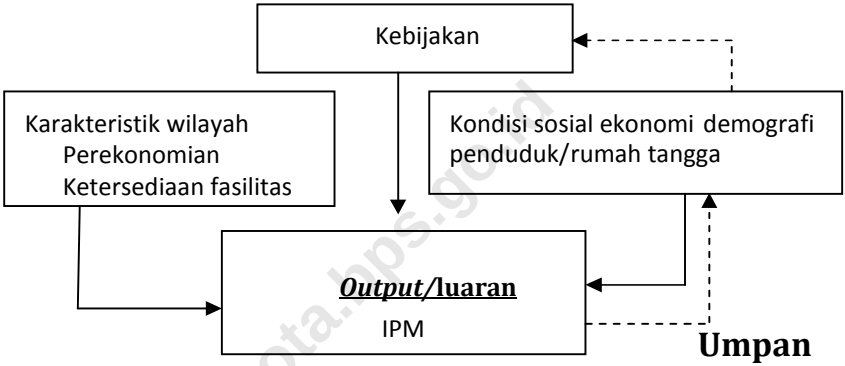

Secara skematis (gambar 4.4) terdapat tiga hal yang dapat menjadi fokus perhatian dalam analisis yang dilakukan. Tiga hal tersebut merupakan aspek penentu disparitas keberhasilan program pembangunan suatu wilayah yaitu latar belakang wilayah (berupa tingkat perekonomian dan ketersediaan fasilitas), kebijakan sosial yang diambil, dan kondisi sosial ekonomi demografi dari penduduk atau rumah tangga.

Kondisi perekonomian Yogyakarta cenderung naik pada lima tahun terakhir (2017-2021). Hanya saja, pada tahun 2020, laju pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas Dasar Harga Konstan 2010 terjadi penurunan yang cukup drastis hingga di angka -2,42. Namun, pada tahun 2021, ekonomi Indonesia mulai bangkit, bahkan, nilai PDRB atas harga konstan pada tahun tersebut tumbuh positif di atas 5 persen. Pertumbuhan ekonomi Kota Yogyakarta mencapai 5,09 persen pada tahun 2020-2021 dengan ditandai

https://jogjakota.bps.go.id

oleh pertumbuhan positif pada hampir seluruh lapangan usaha pendukungnya, kecuali Pertambangan dan Penggalian.

Tabel 4.4 Pertumbuhan PDRB Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan 2010 Tahun 2017-2021

Lapangan Usaha	2017	2018	2019	2020	2021*
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	1,07	1,37	2,00	1,49	0,91
Pertambangan dan Penggalian	2,41	1,12	1,01	-7,39	-4,32
Industri Pengolahan	4,77	3,60	5,49	-4,77	0,18
Pengadaan Listrik dan Gas	3,72	2,94	5,60	-1,35	2,95
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang	3,21	4,49	7,88	0,40	5,55
Konstruksi	5,27	5,57	4,14	-16,23	8,18
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor	5,72	5,19	5,01	-6,02	1,73
Transportasi dan Pergudangan	4,77	5,27	6,37	-14,66	5,52
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	6,84	6,88	8,58	-22,56	5,41
Informasi dan Komunikasi	5,91	6,60	6,90	19,65	12,88
Jasa Keuangan dan Asuransi	3,15	5,09	7,81	-0,53	0,80
Real Estate	4,47	5,46	5,20	1,88	1,20
Jasa Perusahaan	6,42	5,32	5,72	-17,43	8,29
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib	4,60	4,03	3,05	-2,33	1,81
Jasa Pendidikan	5,07	6,11	6,29	4,13	3,56
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial	5,75	6,44	5,89	18,90	4,95
Jasa Lainnya	5,70	6,46	6,10	-18,88	18,07
PDRB	5,24	5,49	5,96	-2,42	5,09

Sumber: BPS Kota Yogyakarta, 2021

*) angka sementara

Pertumbuhan positif tinggi yaitu tumbuh lebih dari 5 persen pada periode tersebut dicapai oleh lapangan usaha Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang; Konstruksi; Transportasi dan Pergudangan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; Informasi dan Komunikasi; Jasa Perusahaan; dan Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial.

https://jogjakota.bps.go.id

Di Kota Yogyakarta, terdapat 3 (tiga) lapangan usaha yang cukup dominan dalam menyumbang terbentuknya PDRB pada tahun 2021 dengan kontribusi di atas 10 persen,yakni: Industri Pengolahan; Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum; dan Informasi dan Teknologi.

Tabel 4.5 Jumlah Hotel/Jasa Akomodasi Menurut Kecamatan
Di Kota Yogyakarta Tahun 2021

Kecamatan	Bintang	Non Bintang	Jumlah
(1)	(2)	(3)	(4)
1. Mantrijeron	6	66	72
2. Kraton	1	14	15
3. Mergangsan	13	72	85
4. Umbulharjo	7	53	60
5. Kotagede	1	11	12
6. Gondokusuman	13	31	44
7. Danurejan	6	36	42
8. Pakualaman	2	12	14
9. Gondomanan	3	11	14
10. Ngampilan	5	15	20
11. Wirobrajan	1	24	25
12. Gedongtengen	23	124	147
13. Jetis	15	15	30
14. Tegalrejo	4	11	15
Kota Yogyakarta	100	495	595

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka, 2022

https://jogjakota.bps.go.id

Beberapa lapangan usaha tersebut masih memiliki tingkat pertumbuhan yang signifikan dan menjadi tumpuan perekonomian Kota Yogyakarta. Tersedianya hotel/jasa akomodasi baik bintang maupun non bintang dan *image* Yogyakarta sebagai tujuan wisata merupakan penopang berkembangnya sektor terkait.

Tabel 4.6 Posisi Kredit UMKM yang Diberikan Bank Umum dan BPR di Kota Yogyakarta 2018-2021

Sektor Ekonomi	2018	2019	2020	2021
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan	31.071	35.223	55.699	78.439
Pertambangan dan Penggalian	7.43	6.372	4.375	5.138
Industri Pengolahan	370.373	386.356	468.305	566.46
Pengadaan Listrik dan Gas	8.538	14.674	3.17	2.471
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang	2.414	1.916	1.914	2.582
Konstruksi	248.499	306.316	278.254	378.666
Perdangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil dan Motor	2.306.615	2.249.460	2.209.336	2.421.679
Transportasi dan Pergudangan	72.324	62.118	62.793	59.275
Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	554.697	700.595	731.968	794.377
Informasi dan Komunikasi	66.142	68.819	53.728	68.803
Jasa Keuangan dan Asuransi	161.665	26.921	16.249	34.185
Real Estate	62.311	168.048	174.929	178.055
Jasa Perusahaan	175.22	133.414	94.129	112.263
Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan, Sosial Wajib	18	0	0	0
Jasa Pendidikan	55.612	65.695	59.207	65.37
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Lainnya	69.454	50.789	36.945	148.233
Jasa Lainnya	296.023	315.129	360.454	456.158

Sumber: Yogyakarta Dalam Angka, 2022

https://jogjakota.bps.go.id

Usaha mikro kecil menengah yang biasanya bersifat informal berkembang menjadi tulang punggung perekonomian Kota Yogyakarta. Hal ini dapat dilihat dari nilai kredit yang dipinjam dari Bank Umum juga sesuai dengan sektor pendukung pertumbuhan ekonomi. Usaha di sektor perdagangan, hotel, restoran pada tahun 2020 jumlah kredit di Bank Umum

dan BPR mencapai 4,02 trilyun rupiah atau sekitar 56 persen dari keseluruhan kredit UMKM. Usaha yang juga berkembang adalah keuangan, persewaan, dan jasa perusahaan lain, tampaknya terkait pula dengan Kota Yogyakarta sebagai kota pendidikan. Kredit UMKM yang terserap pada tahun 2020dari Bank Umum dan BPR pada sektor ini mencapai sekitar 936 milyar rupiah.

https://jogjakota.bps.go.id

BAB V
KESIMPULAN DAN IMPLIKASI KEBIJAKAN

Secara umum, pembangunan manusia di Yogyakarta pada 2021 lebih baik dibanding tahun lalu. Pada 2021, nilai IPM Kota Yogyakarta mencapai 87,18, di mana nilai ini meningkat dibanding tahun 2020.

Derajat kesehatan Kota Yogyakarta relatif sangat baik, hal ini ditunjukkan angka harapan hidup waktu lahir yang relatif panjang dengan angka mencapai 74,76 tahun pada 2021 (angka maksimal 85). Artinya bayi yang lahir pada 2021 mempunyai kesempatan untuk hidup 74,76 tahun lagi, angka ini lebih baik dibanding kondisi tahun sebelumnya.

Tingkat pendidikan masyarakat Kota Yogyakarta secara umum sudah relatif maju. Hal ini ditunjukkan dengan angka harapan lama sekolah yang mencapai 17,60 serta angka rata-rata lama sekolah yang mencapai 11,72 atau rata-rata sudah menempuh kelas dua Sekolah Lanjutan Tingkat Atas.

Pengeluaran riil per kapita Kota Yogyakarta mengalami peningkatan dari 18.678 pada 2020 menjadi 18.801 pada tahun 2021. Kenaikan nilai ini mengindikasi bahwa daya beli masyarakat juga perlahan membaik dibanding tahun 2020 yang merupakan awal mula dari pandemi Covid-19.

Kesehatan yang merupakan modal penting bagi aktivitas penduduk masih sangat perlu ditingkatkan pada masa yang akan datang walaupun tantangannya semakin berat. Pelayanan kesehatan masyarakat dan upaya perbaikan gizi balita serta upaya pencegahan dan pemberantasan penyakit menular masih perlu menjadi sasaran utama dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Apalagi masih munculnya penyakit menular yang mematikan seperti flu babi (H1N1), flu burung (*alvian influenza*), demam berdarah, HIV/AIDS, hingga Covid-19. Perubahan cuaca yang tidak menentu juga sangat berdampak pada kesehatan.

Kesadaran penduduk untuk menjaga kesehatan maupun berobat di fasilitas kesehatan yang telah tersedia harus ditumbuhkan. Masa kehamilan dan proses kelahiran terus dipantau oleh kader/tenaga kesehatan, pemberian makanan tambahan/vitamin yang penting, atau program suami dan kelurahan siaga masih tetap relevan untuk mencegah kelainan/komplikasi pada kedua

https://jogjakota.bps.go.id

kejadian penting tersebut. Pembinaan terhadap kaum ibu akan pentingnya pemberian ASI eksklusif yang lebih panjang, imunisasi, dan gizi yang baik tetap diperlukan terutama pada masyarakat yang selama ini terpinggirkan/masyarakat miskin.

Hal lain yang perlu mendapatkan perhatian lebih adalah perbaikan mutu lingkungan hidup atau pemukiman yang dapat mendukung pola hidup sehat. Penyediaan sarana air bersih yang lebih berkualitas, pembuangan limbah rumah tangga dan industri, dan lain-lain yang relatif lancar sangat diperlukan agar masyarakat dapat tetap sehat sehingga dapat mengurangi tingkat kesakitan.

Slogan "**Yogya Berhati Nyaman**" yang ramah dan berwawasan lingkungan perlu terus didukung dan disikapi secara proaktif oleh segenap warga masyarakat. Perlu ditumbuhkan budaya menjaga kebersihan lingkungan. Kebijakan harus dilandasi niatan mulia agar kesadaran masyarakat dalam mengelola lingkungan senantiasa berwawasan ramah lingkungan. Masyarakat juga perlu ditingkatkan partisipasinya pada tataran BUDAYA MALU. Ketika budaya malu tersebut berhasil ditancapkan dalam benak warga maka slogan tersebut tidak hanya menjadi jargon semata, tetapi menunjukkan manfaatnya dalam bentuk nyata berupa kesadaran mengelola lingkungan hidup dengan semangat hidup sehat, bersih, tertib, dan saling bertenggang rasa sesama masyarakat.

Strategi yang tetap dapat dilakukan dan dilanjutkan antara lain: mengajak/melibatkan setiap rumah tangga untuk memisahkan sampah organik dan non organik sebelum dibuang di tempat yang disediakan; Pemerintah Kota Yogyakarta dapat memperluas kawasan hijau tengah kota dengan menanam berbagai tanaman yang bisa menjadi paru-paru kota, misalnya dengan memelihara tanaman pada pergola-pergola di pinggir jalan atau pohon perindang di taman. Selain itu perlu pula mengajak partisipasi masyarakat untuk menanam pohon pelindung atau tanaman perindang di lingkungan tempat tinggalnya; Perang terhadap sampah tidak sekedar hanya kebiasan membuang sampah pada tempatnya atau kerja bakti kebersihan lingkungan sebelum hari besar saja, melainkan perlu perang terhadap perilaku buang sampah atau polusi di ruang publik yang sembarangan. Kota hijau atau lebih dikenal dengan '*Green City*' akan terciptakan dengan sendirinya.

https://kotajogja.bps.go.id

Meskipun patut diingat penanggulangan polusi udara termasuk di dalamnya dan harus dilakukan secara terpadu.

Seperti halnya di bidang kesehatan, di bidang pendidikan terlihat masih terdapat kesenjangan akses antara kaum kaya dan miskin, meskipun mulai dikurangi dengan kebijakan zonasi dalam penerimaan murid sekolah, apalagi berlakunya kuota zonasi. Hasil pendidikan sampai tataran tertentu akan tergantung pada pengaruh keluarga, khususnya tingkat pendidikan orang tua dan ada tidaknya tekanan bagi anak untuk lekas meninggalkan bangku sekolah agar dapat segera bekerja. Akan tetapi pembelanjaan publik juga mempunyai pengaruh besar. Dalam hal pendidikan, pembelanjaan publik cenderung membawa pengaruh yang lebih menyetarakan oleh karena sebagian besar pendidikan tingkat dasar dan menengah dikelola oleh pemerintah. Akibatnya, pada tingkat pendidikan dasar saat ini hampir tidak ada perbedaan dalam keikutsertaan di bangku sekolah antara satu kelompok penghasilan dengan yang lainnya.

Pendidikan yang disisipi dengan pengembangan yang diarahkan pada kondisi dan potensi daerah tetap diperlukan, walaupun pandangan global dan kebutuhan daerah lain tidak dikesampingkan. Hal ini terutama pada sekolahsekolah kejuruan, sehingga lulusan yang didapat dapat ditampung pada dunia kerja yang ada di kota ini dan sekaligus dapat menggali potensi sumber daya yang ada. Meskipun demikian pemasukan nilai mental untuk ulet dan jujur tetap diperlukan agar minat terhadap tenaga kerja asal kota ini bagi daerah lain tidak luntur.

Peningkatan peran serta masyarakat termasuk dunia usaha sangat diharapkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan yang diidamkan. Peningkatan dapat diupayakan melalui pengembangan mekanisme kerjasama saling menguntungkan bagi peserta pendidikan dan lembaga pendidikan, masyarakat, dan dunia usaha.

Perencanaan pembangunan manusia harus diutamakan kepada sektor-sektor yang sekiranya dapat mempercepat pemulihan ekonomi masyarakat. Taraf kesejahteraan masyarakat sangat menentukan keberhasilan pembangunan di berbagai bidang. Semakin baik perekonomian masyarakat, akan semakin baik pula tingkat kesehatan dan pendidikan, dan tentunya hal ini menunjang pembangunan yang berkelanjutan.

https://jogjakota.bps.go.id

Upaya menjembatani kesenjangan, khususnya kesehatan dan pendidikan akan membutuhkan tambahan pada anggaran belanja publik yang tidak hanya untuk mengurangi disparitas tetapi juga untuk menjamin adanya kemajuan pada keseluruhannya. Pertumbuhan memang tetap penting tetapi sulit untuk mencapai tingkat pertumbuhan secepat masalah yang ada. Pertumbuhan tidak dapat menciptakan pendapatan swasta yang cukup untuk dapat mengkompensasi rendahnya belanja publik.

Memacu pembangunan manusia melalui pembelanjaan publik juga merupakan suatu hal yang masuk akal karena perbaikan kesehatan dan pendidikan yang dihasilkan akan menjadi 'barang publik', artinya manfaat yang diperoleh tidak hanya dinikmati individu tetapi juga akan bergaung ke seluruh masyarakat. Hal ini disebabkan banyak dari dimensi kesejahteraan umat manusia saling menguatkan satu sama lainnya dan memiliki efek meluber positif bagi seluruh masyarakat.

Peningkatan proses demokrasi telah menciptakan banyak pilihan baru dan membuat kehidupan publik menjadi lebih kompleks, akan tetapi demokrasi tampaknya belum membawa perbaikan ekonomi secara nyata. Masyarakat miskin memiliki beberapa saluran untuk menyampaikan pandangan mereka, namun mereka kekurangan kesempatan untuk mengembangkan kapasitas mereka sampai sepenuhnya. Pendidikan dan kesehatan mereka tertinggal sebagai akibatnya mereka tidak akan pernah dapat mencapai potensi fisik dan mental mereka secara optimal.

Pembangunan manusia telah menunjukkan bahwa terdapat kebebasan yang lebih luas – dengan memperluas pilihan-pilihan orang, tidak hanya kebebasan untuk memilih pemimpin politik tetapi juga untuk menikmati kehidupan yang sehat dan untuk memperoleh pengetahuan dan ketrampilan untuk mengembangkan kapasitas mereka. Oleh karena itu demokrasi tidak boleh dipandang sebagai tujuan akhir tetapi lebih sebagai wahana yang akan membawa daerah ini ke dalam era baru yang memberikan kesempatan-kesempatan baru. Setiap orang mempunyai peran yang harus dijalankan baik sebagai individu maupun dalam keluarga atau masyarakat untuk menjamin proses untuk menikmati buah demokrasi dan mengembangkan diri sepenuhnya.

https://jogjakota.bps.go.id

Prinsip dasar pemenuhan hak warga sebenarnya sudah disetujui di forum-forum internasional. Indonesia telah meratifikasi misalnya Konvensi Penghapusan Segala Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Hak Anak, Perjanjian Internasional atas Hak Sipil dan Politik, dan Perjanjian Internasional atas Hak Ekonomi Sosial dan Budaya. Indonesia juga telah menyetujui tindakan Perserikatan Bangsa-Bangsa yang menyatukan hak-hak politik dan hak-hak sosial ekonomi ke dalam 'hak atas pembangunan'.

Di Indonesia sampai sejauh tertentu negara telah memenuhi hak-hak ekonomi dan sosial warganya. Layanan publik tidak lagi berdasarkan dari segi kebutuhan tetapi dari segi hak. Hal ini mungkin sulit diterapkan tetapi sangat diperlukan untuk mendapatkan situasi yang lebih baik pada masa datang. Terdapat beberapa kesepakan bahwa pendekatan ini mengandung beberapa unsur dasar, antara lain:

1. Kesetaraan : pelayanan dengan standar yang sama
2. Ketidakterpisahan : hak yang satu tidak dapat didahulukan dari hak lainnya
3. Standar kinerja :upaya menetapkan target yang terukur dan upaya memantau pencapaian target-target.
4. Partisipasi : perhatian khusus tidak hanya pada upaya memenuhi hak, tetapi juga pada bagaimana hak-hak ini dipenuhi.
5. Pemberdayaan : orang-orang yang dapat menuntut haknya merasa dalam posisi yang lebih kuat.
6. Akuntabilitas : penafsiran yang paling kuat akan hak asasi manusia menuntut adanya kemungkinan melakukan tindakan hukum dalam mengejar pemenuhan hak-hak.

Ada berbagai jalan untuk mencapai pembangunan manusia yang lebih baik. Pertumbuhan ekonomi dapat membawa sukses pembangunan manusia. Pertama, dengan meningkatkan standar hidup secara keseluruhan dan mengurangi kemiskinan. Kedua, dengan meningkatkan kapasitas pemerintah daerah untuk menyediakan anggaran belanja yang lebih besar untuk pendidikan, pelayanan kesehatan, dan berbagai program untuk

https://jogjakota.bps.go.id

memerangi kemiskinan. Hubungan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan manusia tidak langsung tetapi tergantung dua hal yaitu mutu pertumbuhan dalam distribusi pendapatan dan prioritas belanja pemerintah daerah. Terlalu mengandalkan belanja swasta biasanya mendapatkan ketimpangan yang lebih besar karena belanja swasta biasanya kurang terdistribusi secara merata dibandingkan belanja publik. Oleh karena itu diperlukan keseimbangan antara peran sektor swasta dan publik dalam menyediakan layanan sosial.

Di samping langkah-langkah tersebut, berbagai dimensi pembangunan manusia mempunyai hubungan yang sinergis dengan pertumbuhan ekonomi, saling memperkuat dampak satu sama lainnya. Oleh karena itu perlu dukungan publik yang memadai untuk setiap bidang ini. Hal ini tidak mudah tetapi dengan berbasis hak dapat membantu karena dengan pendekatan ini menuntut adanya partisipasi aktif dari para penerima manfaat. Para penerima manfaat ini cenderung dapat lebih menghargai bagaimana harus sebaik mungkin menggunakan sumber daya yang terbatas secara optimal dan turut memelihara keberlanjutannya.

Penjaringan investor baik dari dalam maupun luar negeri untuk menanamkan modalnya di kota ini merupakan langkah yang positif. Oleh karena dengan masuknya investor maka akan mendorong bagi tumbuhnya perekonomian daerah, selain bisa meningkatkan akses terhadap kebutuhan tenaga kerja bagi masyarakat. Investasi yang masuk harus dapat memberikan manfaat yang besar bagi masyarakat. Situasi yang tidak kondusif seperti tindakan anarkis yang memperburuk citra daerah perlu dihindarkan agar investor tidak ragu untuk masuk dan menanamkan modalnya. Dukungan lain adalah birokrasi yang tidak berbelit-belit. Investor akan enggan jika untuk menanamkan modalnya harus melalui berbagai pintu atau meja yang sulit. Hanya saja investor yang masuk harus bisa memberikan kesempatan kerja yang luas. Apalagi pada saat ini banyak masyarakat yang membutuhkan pekerjaan atau banyak pengangguran. Jika lapangan kerja tersedia maka warga tidak perlu jauh-jauh mencari pekerjaan ke daerah lain atau bahkan ke negara lain.

Kegiatan informal yang berkembang sangat baik di kota ini bahkan bisa menjadi sabuk pengaman yang baik bagi perekonomian masyarakat pada saat krisis ekonomi dan diikuti krisis global, perlu diperhatikan penanganan

https://jogjakota.bps.go.id

dan perkembangannya. Program-program penataan atau relokasi yang ada perlu dikomunikasikan lebih efektif dan efisien dengan melibatkan seluruh pihak yang berkepentingan untuk mendapatkan apa yang menjadi tujuan bersama yaitu masyarakat yang sehat, maju, dan sejahtera.

https://jogjakota.bps.go.id

DAFTAR PUSTAKA

Booth, A. 1999."*Survey of Recent Development*". Bulletin of Indonesian Economic Studies 35 (3): 3-38.

Booth, A. 2000. "*Poverty and Inequality in the Soeharto Era: An Assessment*". Bulletin of Indonesian Economic Studies36 (1): 73-104.

BPS-Bappenas-UNDP. 2001. Indonesia Human Development Report 2001 Toward A New Consensus. Jakarta

BPS-Bappenas-UNDP. 2004. Indonesia Human Development Report 2004. The Economics of Democracy, Financing Human Development in Indonesia. Jakarta

BPS. 2008. Indeks Pembangunan Manusia 2007. Jakarta

BPS. 2010. Data dan Informasi Kemiskinan per Kabupaten/ Kota 2009. Jakarta

BPS Provinsi DIY.2021. *[Metode Baru] Indeks Pembangunan Manusia 2010−2021*. Yogyakarta

BPS Provinsi DIY.2021.*[Metode Baru] Harapan Lama Sekolah (Tahun) 2010−2021*. Yogyakarta

BPS Provinsi DIY.2021.*[Metode Baru] Pengeluaran per Kapita Disesuaikan 2010−2021*. Yogyakarta

BPS Provinsi DIY.2021.*[Metode Baru] Rata-rata Lama Sekolah (Tahun) 2010−2021*. Yogyakarta

BPS Provinsi DIY.2021.*[Metode Baru] Umur Harapan Hidup Saat Lahir (UHH) 2010−2021*. Yogyakarta

BPS Kota Yogyakarta.2022.*Yogyakarta Dalam Angka 2022*. Yogyakarta

BPS Kota Yogyakarta.2021.*Penduduk Kota Yogyakarta; Hasil Sensus Penduduk 1961−2020*. Yogyakarta

BPS Kota Yogyakarta.2021.*Produk Domestik Regional Bruto Kota Yogyakarta Menurut Lapangan Usaha 2017−2020*. Yogyakarta

BPS Kota Yogyakarta.2021.*Indikator Kesejahteraan Rakyat Kota Yogyakarta 2021*. Yogyakarta

https://jogjakota.bps.go.id

Brata, A. G. dan Z. Arifin. 2003. “Alokasi Investasi Sektor Publik dan Pengaruhnya Terhadap Konvergensi Ekonomi Regional di Indonesia”. Media Ekonomi 13 (20): 59-71.

Daliyo, Haning Romdiati, dan Suko Bandiyono. 1994. *Indeks Perkembangan Manusia Jawa Barat 1980-1990*. Puslitbang Kependudukan dan Ketenagakerjaan LIPI. Jakarta.

Fane, G. 2000. “*Survey of Recent Developments*”. Bulletin of Indonesian Economic Studies36 (1): 13-44

Imawan, W. 2001.Indikator Komposit Pembangunan Manusia: Indikator sosial untuk monitoring dan evaluasi kinerja pembangunan suatu wilayah pemerintahan.BPS. Jakarta.

Lanjauw, P., M. Pradhan, F. Saadah, H. Sayed, R. Sparrow. 2001. *Poverty, Education and Health in Indonesia: Who Benefits from Public Spending?*.World Bank Working Paper No. 2739. December 2001.

Ramirez, A., G. Ranis, dan F. Stewart. 1998. “*Economic Growth and Human Capital*”. *QEH Working Paper* No. 18.

UNDP.2009. *Human Development Report*. UNDP. New York.

https://jogjakota.bps.go.id

https://jogjakota.bps.go.id

DATA

MENCERDASKAN BANGSA

https://jogjakota.bps.go.id

BADAN PUSAT STATISTIK KOTA YOGYAKARTA
Jl. Brigjen Katamso Komplek THR Yogyakarta
Telp (0274) 387752, Fax (0274) 387753
Homepage : http://www.jogjakota.bps.go.id